



**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR
DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP
EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

LYKA MONICA DAULAY
NPM 1415100123

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LYKA MONICA DAULAY
NPM : 1415100123
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

MEDAN, JUNI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

DEKAN

(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Rahima br.Purba, SE., M.Si, Ak., CA)

PEMBIMBING II

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUCI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : LYKA MONICA DAULAY
NPM : 1415100123
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI
PARKIR TERHADAP EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA MEDAN

MEDAN, JUNI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si)

ANGGOTA -I

(Rahima br. Purba, SE.,M.Si, Ak.,CA)

ANGGOTA -II

(Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si)

ANGGOTA-III

(Drs Mulkanuddin Ritonga,MM.,Ak)

ANGGOTA-IV

(Drs Abdul Hasyim BB,Ak.,MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : LYKA MONICA DAULAY

NPM : 1415100123

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Schubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2019

Penulis,



Lyka Monica Daulay

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : LYKA MONICA DAULAY
NPM : 1415100123
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Ekklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2019

Penulis,



Lyka Monica Daulay

Acc jilid Lux

15/9-2019



**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR
DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP
EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

LYKA MONICA DAULAY
NPM 1415100123

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2018**

Ace Jibid Lwo
Lilip 17/06
2019
DPG



**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR
DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP
EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

LYKA MONICA DAULAY
NPM 1415100123

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 50 200 511 PO.BOX.1099 Medan.
 http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Selasa, Tanggal 24 Juli 2018, Pukul 14.00 Wib, bertempat Ruang Seminar Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan telah dilaksanakan Seminar Proposal kepada :

Nama : Lyta Monica D.
 N.P.M : 1415100123
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Pengaruh Efektivitas Perolehan dan Penerimaan Perolehan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan APBD Daerah Kota Medan.
 Pembimbing - I : Rahma H. Raha, SE, Msi.
 Pembimbing - II : Fitri Yuli Peggabean, SE, M.Si.

Berdasarkan hasil dari Tim Seminar, bahwa Proposal Skripsi (Out Line) yang diseminarkan dianggap Layak Tidak Layak, dan masih Perlu disempurnakan dengan materi sebagai berikut :

- | Halaman | Materi Perbaikan |
|---------|---|
| 9 | - penyempurnaan Bab I |
| 29 | - judul diganti menjadi "Analisis kuantitatif pengaruh perolehan dan penerimaan perolehan terhadap efektivitas pelaksanaan APBD daerah Kota Medan"
- pada tabel operasionalisasi variabel : pengukuran variabel indikator, definisi singkat, dan deskripsi |
| 5 | Tujuan penelitian & rumusan penelitian sesuai dengan hipotesis |
| 17 | Halua (200) => referensi yg dipakai minimal 10 tahun (2) |
| 25 | - Deskripsi PAD => sumbernya dimana??
- Daftar pustaka disesuaikan dgn isi, penulisan sesuai panduan |

Penguji

 Anggi Pratama Nasution, SE, M.Si

Team Penguji,
 Pembimbing - I

 Rahma H. Raha, SE, M.Si

Pembimbing - II

 Fitri Yuli Peggabean, SE, M.Si

Diketahui Oleh,
 Ketua Program Studi

Anggi Pratama Nasution, SE, M.Si

BIODATA

Data Pribadi :

Nama : Lyka Monica Daulay
Tempat/tanggal lahir : Tangerang, 12 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Jl. Jamin Ginting No 667 Medan, Sumatera Utara
No. Hp : 085213171491
E-mail : likamonica120595@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. Tamatan SD Negeri 060894 Medan Baru Tahun 2007 Berijazah.
2. Tamatan SMP Negeri 41 Medan Tahun 2010 Berijazah.
3. Tamatan SMA Swasta Raksana Tahun 2013 Berijazah.

Demikianlah biodata ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya



Lyka Monica Daulay



UNIVERSITA PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571

Website: www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id

Medan – Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Rahima br.Purba,SE,M.Si,Ak,CA.
Dosen Pembimbing II : Fitriyani Panggabean,SE,M.Si.
Nama Mahasiswa : LYKA MONICA DAULAY
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100123
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Efektivitas Pajak dan Retribusi
Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota
Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
26/2/2018	latar belakang masalah, identifikasi masalah, kerangka konseptual, definisi operasional.		
2/3/2018	Identifikasi masalah, batasan masalah; Bab II; Bab III,		
5/3/2018	Acc utk diseminarkan.		

Medan, 5 Maret 2018
Diketahui/Disetujui oleh:
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.


*)Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Kahana br Nita, SE, M.Si, Ak, CA
 Dosen Pembimbing II : Fitriyani Panggabean, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : LYKA MONICA DAULAY
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100123
 Bidang Pendidikan : ~~Stata~~ Strata Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Efektivitas Pihak Partisipatif dan Kontribusi Partisipatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Acli Daerah Kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20/04 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Cover - Daftar isi - Daftar Gambar - Daftar tabel - spasi setiap baris - tabel - Kesalahan kasypul - Opini v. - Skedul pas P - teori & ow. - populasi & sampel - Metode. (tabel sampel) - definisi (R^2). 		

Medan, 20 April 2018

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,




Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahma Br. Purba, SE, Msi, Ak-CIA
 Dosen Pembimbing II : Fitriani Panggabean, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : LYKA MONICA DAULAY
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100123
 jenjang Pendidikan : S1 (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
07/05 -2018	<ul style="list-style-type: none"> - sistematika penulisan skripsi - sumber referensi yg dipakai minimal 10 tahun (min 2008) - penulisan uraian 3 pd DP - identifikasi & Rumusan Masalah substantive - penulisan Times New Roman (TMR) - Tempat penulisan - Waktu penulisan - Operasional variabel (sumber) - Uji determinasi (R^2) - Daftar pustaka - sumber data yg dipakai dan lanjut 		

Medan, 07 Mei 2018

Diketahui/Dijetujui oleh :
 Dekan,



 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : *Rahma Pr. Purba, SE, M. Si, Ak, CA.*
 Dosen Pembimbing II : *Fitriyani, Pengajaran, SE, M. Si*
 Nama Mahasiswa : LYKA MONICA DAULAY
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100123
 Jenjang Pendidikan : *S1*
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : *Pengaruh Pajak, Partur Dan Partisipasi Partur Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.*

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
<i>30/06/2018</i>	<ul style="list-style-type: none"> * Sistematika Penulisan. * Penulisan Pengantar (Jurnal, buku / Referensi) * Keaslian Penelitian (Perbedaan penelitian lebih ditunjukkan) * Penulisan bahasa asing / kutipan. * Sumber kutipan harus dimuatkan. * Penulisan nominal angka dalam tabel diperbaiki. * Kerangka konseptual lebih baik ^{lebih baik} jika dispesifikasikan. * Operasional variabel lebih baik di spesifikasikan. * Penulisan daftar Rata-rata (Spasi). 		
	<p><i>Ace Semijar Proposal.</i></p> <p><i>7/07-2018</i></p>		

Medan, 07 Juli 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rohima Br. Purba, SE, M.si
 Dosen Pembimbing II : Fitriyani Panggabean, SE, M.si
 Nama Mahasiswa : LYKA MONICA DAULAY
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100123
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Pembusi Parkir Tercepat
 Efektivitas Penempatan Asli Daerah Kota Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
01/12 - 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Logo diganti sesuai dengan panduan - Spasi nama, Tahun Pada Cover - Pada abstrak, tidak menggunakan garis bawah. Dan awal kalimat hanya satu kata, tidak usah mengulang kekilian. - Kata pengantar disesuaikan dengan panduan. - Daftar isi disesuaikan dgn panduan. - Daftar tabel harus pakai tab. - Sistematika Bab, sub bab dr Bab 1 s/d 5. - Tabel Mapping Penelitian sebelumnya dibuat lebih rapi. - tabel Speed Penelitian dibuat lebih rapi. - Peletakan koefisien determinasi setelah Pengujian hipotesis. - Tabulasi data, pengujian data diperbaiki lagi. 		

Medan, 30 November 2018

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahma Br. Purba, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yanti Panggabean, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : LYKA MONICA DAULAY
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100123
 Bidang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Efektivitas Point Porter dan Pembusi Porter Terhadap Efektivitas Pendapatun Asli Daerah Kota Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20/10-2018	Def. Operational Siperbaita		
19/11-2018	Tambahkan Uji koefisien determinasi metapel. → R^2 → R^2 Variabel → efektivitas + 1. 3		
1/11-2018	Acc Sidang		Acc Sidang. 2/11-2018.

Medan, 19 Oktober 2018
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nisa S.H. M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpa@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br. Purba, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yani Panggabean, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : LYKA MONICA DAULAY
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100123
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
6/12 18	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan kalimat pada tempat dan waktu Penelitian (dibuang). - Penulisan Undang-Undang di daftar pustaka. - Penulisan t tabel dan t hitung diperbaiki. - Penerapan bahasa asing (gens Mining) - Penulisan usi (F) huruf besar. - Penulisan gelar dosen diperbaiki. - Jarak antar tabel. - Spasi antar bab. 		

Asse Koding Skripsi
 08/12
 - 2018

Medan, 06 Desember 2018
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Prima Br. Paha / SE, M.Si, Ak. CA.
 Dosen Pembimbing II : Hanyani Perampoh / SE, M.Si.
 Nama Mahasiswa : LYKA MONICA DAULAY
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100123
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Efektivitas Pajak Pertar dan Retribusi Pertar terhadap Efektivitas Persewaan Ase Daerah Kota Medan

TANGGAL	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
06/04 - 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Cover - kata pengantar - Daftar isi - Daftar Gambar - Daftar tabel - Instruksi ke penulisan kutipan Bal - Penulisan tabel teks tabel - Bahasa asing di garis miring - Pustaka yg dipakai minimal tahun 2008 - Mapping penulisan subjudul - Tabel tabel pada penulisan - operasi: koreksi - gambar koreksi (gambar) - koreksi gambar dan tabel - Daftar tabel koreksi 		

Medan, 05 April 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

- deskripsi pada operasi koreksi (koreksi gambar dan gambar)
- penulisan variabel koreksi
- penulisan persamaan Regresi (Dua)
- Daftar pustaka (koreksi pada)
- penulisan undang-undang? pada pp.
- koreksi penulisan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1551 / Papp / Bp / 2018

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 12 Desember 2018
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LYKA MONICA DAULAY
Tempat/Tgl. Lahir : TANGERANG / 12 Mei 1995
Nama Orang Tua : DAHRIS DAULAY
N. P. M : 1415100123
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 087766099357
Alamat : JLN JAMIN GINTING



Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah dibahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	5000

Total Biaya : Rp. 2,105,000
2.100.000

MHT 50% : Rp 2.500.000
Rp 4.600.000



12/12-18
Hormat saya
LYKA MONICA DAULAY
1415100123

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 50200511 Medan
fasosa@pancabudo.ac.id http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa Tanggal, 19 Bulan, Maret Tahun, 2019, telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi Semester Tahun Akademik 2019 bagi mahasiswa/i atas nama :

1. Nama : Lyka Monika D
2. Npm : 1415100123
3. Program Studi : Akuntansi
4. Tanggal Ujian : 19 Maret 2019
5. Judul Skripsi Lama : Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli daerah kota Medan Tahun 2013-2015.
6. Judul Skripsi Baru : Analisis Efektivitas Pajak parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah kota Medan

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Danggi Pontama Nasution, SE., M.Si	
2	Anggota I/ Pembimbing I	Rahma br Purba, SE., M.Si, Ak., CA	
3	Anggota II/ Pembimbing II	Fita Yanti Panggabean, SE., M.Si	
4	Anggota III/ Penguji I	Drs. Mukhammad Ritonga, MM. Ak	
5	Anggota IV/ Penguji II	Drs. Abdi Nasijim BS, Ak., MM	

Diketahui

Dr. Surya Kito

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : LYKA MONICA DAULAY
 Tanggal Lahir : TANGERANG / 12 Mei 1995
 NIM / NPM / NIS / NIK : 1415100123
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi
 Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.48
 Nama dan gelar mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Analisis Pengaruh Efektifitas Pajak Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2013-2015	<input checked="" type="checkbox"/>
PENGARUH BESARNYA TARIF PBBKB DI PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP PENERIMAAN PBBKB PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.	<input type="checkbox"/>
ANALISIS TINGKAT KREDIBILITAS PEGAWAI PAJAK DI KPP PRATAMA LUBUK PAKAM TERHADAP MINAT MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG MEMBAYAR PAJAK.	<input type="checkbox"/>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor
 Ir. Bhakti Alam Syah, M.S., Ph.D.

Medan, 18 Oktober 2017
 Pemohon,

 (LYKA MONICA DAULAY)

Nomor :
 Tanggal : 24 Oktober 2017
 Ditahankan oleh :
 Dekan :

 (Drs. Anwar Sugandi, M.Si)

Tanggal : 18 Oktober 2017
 Ditetapkan oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi :

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 23 Oktober 2017
 Ditetapkan oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Rahma Nur Hafid, SE, MPA, Ak. CA)

Tanggal : 23 Oktober 2017
 Ditetapkan oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Fitriyani Rizkiyanti, SE, MPA, Ak. CA)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

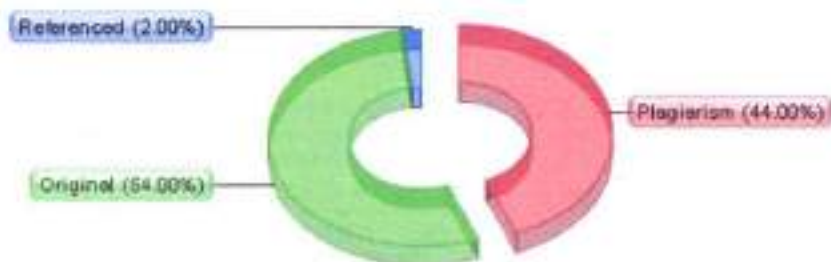
Analyzed document: 10-12-18 8:16:40 AM

"LYKA MONICA DAULAY_1415100123_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 67	wrds: 7595	http://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/65544/analisis-pengaruh-efektivitas-pajak...
% 34	wrds: 4053	http://eprints.dinus.ac.id/8833/1/jurnal_13626.pdf
% 30	wrds: 3435	http://karyalimiah.unisba.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/file/13478/pdf

[Show other Sources:]

Processed resources details:

267 - Ok / 106 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon: (061) 4555693 Faks: (061) 4555693
E-mail: balitbangmedan@yahoo.co.id Website: balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/114/Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 Desember 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor: 851/17/FEB/2018 Tanggal: 15 Januari 2018 tentang permohonan observasi penelitian.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Lyka Monica Daulay.
NPM : 1415100123.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul : Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2013 sampai 2015.
Lamanya : 3 (tiga) bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .

Pada Tanggal : 25 JANUARI 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Drs. H. PARASUTAN, M.Pd

NIP. 95911141984031002



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
4. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.
5. Yang bersangkutan.
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1104/Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Nomor: 1879/17/FSSA/2018 Tanggal : 27 Juli 2018 Hal : Permohonan Research.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama	: Lyka Monica Daulay.
NPM	: 1415100123.
Program Studi	: Akuntansi.
Lokasi	: Dinas Perhubungan Kota Medan , Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan , Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
Judul	: Pengaruh Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
Lamanya	: 3 (tiga) Bulan.
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
 Pada Tanggal : 06 Agustus 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Drs. H. MARASUTAN, M. Pd
 PEMBINA UTAMA MUDA

NPE 1859114 198403 1 002

Yembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa besar tingkat efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Serta untuk mengetahui seberapa besar pajak parkir dan retribusi parkir dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah Kota Medan, dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu laporan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir pada tahun 2014 sampai dengan 2016, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 sampel. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dengan mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi dari setiap variabel. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwasannya tingkat efektivitas pajak parkir pada tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat terbilang cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan tingkat toleransi rata-rata melebihi 100%. Namun untuk efektivitas retribusi parkir belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan nilai toleransinya kurang dari 80%. Pajak parkir berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar 6,09% , pada tahun 2015 naik pada angka 8,32%, dan pada tahun 2016 mencapai 10,98% hal ini berarti untuk sektor pajak parkir, memiliki peluang yang cukup besar untuk berkontribusi lebih terhadap PAD. Sedangkan retribusi parkir memiliki nilai kontribusi sebesar 9,73% pada tahun 2014 dan 10,34% ditahun 2015, dan pada tahun 2016 memiliki nilai sebesar 13,59%.

Kata kunci: Efektivitas Pajak Parkir, Efektivitas Retribusi Parkir, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to see how much the level of parking tax effectiveness and parking decisions in 2014 to 2016. As well as to find out how much parking tax and parking fees can contribute to Medan's regional revenue in 2014 to 2016. As for those who are the population in this study is the financial statements of the city of Medan, and the sample in this study is the report on parking tax receipts and parking retribution in 2014 to 2016, then the number of samples in this study was 36 samples. Data analysis method used is quantitative method using primary data by measuring the level of effectiveness and contribution of each variable. The results of this study are that the effectiveness of parking tax in 2014 to 2016 can be said to be quite effective, this is evidenced by the average tolerance level exceeding 100%. However, the effectiveness of parking fees cannot be said to be effective, because the tolerance value is less than 80%. Parking tax contributes to regional revenue in 2014 of 6.09%, in 2015 it rose to 8.32%, and in 2016 reached 10.98% this means that for the parking tax sector, there are considerable opportunities for contribute more to PAD. While parking retribution has a contribution value of 9.73% in 2014 and 10.34% in 2015, and in 2016 has a value of 13.59%.

Keywords: Effectiveness of Parking Tax, Effectiveness of Parking Retribution, Effectiveness Locally-generated revenue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam segi ilmu pengetahuan dalam pengalaman penulis, sehingga dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik dan saran yang baik dan bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H. Muhammad Isa Irawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nst, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Rahima br.Purba, SE., M.Si Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan baik.

6. Seluruh Civitas Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, kampus saya tercinta tempat saya menimba ilmu untuk meraih sarjana.
7. Kedua orang tua saya yang terkasih yang telah mendidik, membesarkan, dan memberikan kasih sayang berlimpah kepada peneliti sehingga peneliti bisa menjadi seperti sekarang ini karena dukungan dari mereka.
8. Kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi pada penulis hingga selesainya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terima kasih atas dukungan semangat dan doanya.
10. Teman-teman sekelas dan rekan sekantor penulis yang memberikan dukungan, sumbangan pemikiran sehingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, untuk itu bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang saya harapkan.

Semoga dalam penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala dorongan dan bantuannya.

Medan, Juni 2019

Penulis,

Lyka Monica Daulay

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Otonomi Daerah	9
2. Pajak.....	13
3. Pajak Parkir	18
4. Retribusi Daerah.....	19
5. Retribusi Parkir	21
6. Pendapatan Asli Daerah	23
7. Efektivitas	25
8. Analisis Kontribusi	25
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Hipotesis Penelitian	31
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Populasi, Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	34

D. Definisi Operasional Variabel	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Sejarah Kota Medan	41
2. Letak Geografis Kota Medan	45
3. Batas wilayah Kota Medan	45
4. Sejarah Singkat BPKAD Kota Medan	46
5. Visi dan Misi Objek Penelitian	48
6. Struktur Organisasi Objek Penelitian	51
7. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir.....	52
8. Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Parkir.....	53
9. Hasil Perhitungan Efektivitas PAD	54
10. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD.....	54
B. Pembahasan.....	57
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Simpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2014-2016	3
Tabel 2.1 Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum.....	22
Tabel 2.2 Tarif Parkir di Tempat Khusus.....	22
Tabel 2.3 <i>Mapping</i> Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	34
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	35
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Parkir	52
Tabel 4.2 Kriteria Efektivitas Pajak Parkir	52
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Retribusi Parkir.....	53
Tabel 4.4 Kriteria Efektivitas Retribusi Parkir	53
Tabel 4.5 Target dan Realisasi PAD	54
Tabel 4.6 Kriteria Efektivitas PAD	54
Tabel 4.7 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD.....	55
Tabel 4.8 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber pendapatan asli daerah salah satunya pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Ahmad (2013:56) “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Adapun jenis-jenis pajak daerah diantaranya yaitu pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau suatu badan usaha yang menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Menurut Ahmad (2013:68) “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha”. Salah satu jenis retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir adalah pembayaran atau penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sagita Purnomo dalam artikelnya pada www.harian.analisadaily.com 2016/03/05 “*Keberadaan Juru Parkir (Jukir) liar di Kota Medan semakin memprihatinkan, ibarat jamur dimusim penghujan, oknum jukir berseragam ini terus tumbuh dan bertambah memenuhi ruas jalanan kota. Hal ini yang melatarbelakangi pihak Polresta Medan melakukan penyisiran dan razia disejumlah lokasi untuk mengamankan jukir liar yang kerap meresahkan warga. Jukir liar ini kerap memeras masyarakat dengan memungut retribusi parkir tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda)*”.

Indonesia termasuk negara yang memiliki wilayah bagian cukup luas. Setiap daerah memiliki potensi masing-masing untuk dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi daerahnya sendiri sebagai sumber penerimaan, maka semakin kecil juga bantuan pemerintah pusat ataupun provinsi. Namun pada kenyataannya sektor yang selama ini diharapkan sebagai komposisi daripada pemasukan itu sendiri belum cukup mampu untuk membiayai kebutuhan tiap-tiap daerah, hal itu diperkuat dengan adanya data sebagai berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Medan Tahun 2014-2016

Tahun Anggaran	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi Penerimaan
2014	Retribusi Parkir	Rp.17.557.000.000	Rp.13.472.001.000
2015	Retribusi Parkir	Rp.27.968.600.000	Rp.19.882.116.000
2016	Retribusi Parkir	Rp.27.968.600.000	Rp.20.872.291.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan "Buku Besar Penerimaan Retribusi Parkir"

Dalam data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi parkir dalam kurun waktu 3(tiga) tahun tersebut tidak pernah terealisasi sepenuhnya. Pada tahun 2014,2015,2016 memang mengalami kenaikan penerimaan realisasi namun tidak efektif. T.Eswin (Anggota DPRD Kota Medan) mengungkapkan "*Hal ini disebabkan oleh salah satunya terkait banyaknya temuan terkait tarif parkir diluar ketentuan yang telah ditentukan peraturan daerah Kota Medan, dimana dinilai hal ini sangat merugikan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah Kota Medan*". Dibandingkan dengan sektor retribusi lainnya, penerimaan retribusi parkir belum bisa dikatakan efektif untuk penerimaannya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sangat disayangkan mengingat potensi dari retribusi parkir maupun pajak parkir di Kota Medan. Apabila dikelola dengan benar, maka realisasi penerimaan dari sektor tersebut

dapat tercapai dengan maksimal. Penelitian yang menjadikan pajak parkir dan retribusi parkir sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen sudah cukup banyak dilakukan. Diantaranya yaitu Debi pada tahun (2014) yang penelitian tersebut menyimpulkan bahwa efektivitas pajak parkir tergolong efektif terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Destika pada tahun (2014) yang menyimpulkan bahwa efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pendapatan asli daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Ghanang pada tahun (2016) menyimpulkan bahwa efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir tergolong efektif terhadap efektivitas pendapatan asli daerah.

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Medan pada realisasi penerimaan Retribusi Parkir terjadi peningkatan disetiap tahunnya namun realisasi tersebut belum bisa mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan.

- b. Banyaknya juru parkir liar di Kota Medan yang memungut retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tidak terealisasinya Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang tidak maksimal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disusun batasan masalah sebagai berikut:

- a. Batasan aspek penelitian ini adalah hanya terhadap akuntansi keuangan pemerintah Kota Medan yang berkaitan dengan nilai target dan realisasi pajak parkir, nilai target dan realisasi retribusi parkir seta nilai daripada target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Medan.
- b. Batasan waktu dari penelitian ini adalah dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 2016.
- c. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Medan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Medan pada tahun 2014 sampai dengan 2016?
2. Bagaimana tingkat efektivitas retribusi parkir di Kota Medan pada tahun 2014 sampai dengan 2016?
3. Seberapa besar kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan 2016?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Medan pada tahun 2014 sampai dengan 2016.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi parkir di Kota Medan pada tahun 2014 sampai dengan 2016.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada tahun 2014 sampai dengan 2016.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Medan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan saran yang berguna kepada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Medan mengenai bagaimana analisis efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Medan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Destika Relegia (2014), Universitas Telkom Indonesia “Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011 sampai 2013”. Sedangkan judul penelitian ini “Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”.

Perbedaan penelitian ini terletak pada:

1. Judul penelitian : Penelitian terdahulu berjudul Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Model penelitian : Dalam penelitian terdahulu menggunakan model analisis pengaruh regresi liner berganda. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder .
3. Waktu penelitian : Penelitian sebelumnya memakai batas waktu penelitian pada tahun 2011-2013 sedangkan penelitian ini memakai batas waktu pada tahun 2014-2016.

4. Wilayah penelitian : Penelitian sebelumnya menjadikan pemerintah Kota Manado untuk menjadi objek penelitiannya sedangkan penelitian ini menjadikan pemerintah Kota Medan menjadi objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

a. Pengertian

Definisi otonomi daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

c. Tujuan otonomi daerah

Adapun tujuan dari otonomi daerah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- 2) Pengembangan kehidupan demokrasi.
- 3) Keadilan nasional.
- 4) Pemerataan wilayah daerah.
- 5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Mendorong pemberdayaan masyarakat.

- 7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

d. Asas Otonomi Daerah

Adapun yang menjadi asas dari otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ialah terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu asas Desentralisasi memiliki adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi Asas dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau alat-alat kelengkapan

pemerintah pusat di daerah lainnya yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Asas Tugas Pembantuan Asas tugas pembantuan adalah pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah kabupaten / kota kepada desa yang diberi amanat untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu.

e. Ciri-Ciri Otonomi Daerah

Adapun ciri ciri otonomi daerah sebagai berikut :

1. Setiap daerah memiliki Peraturan Daerah dengan kata lain peraturan tersebut kedudukannya masih dibawah Undang-Undang.
2. Hanya Presiden atau Raja yang berwenang yang dapat mengatur hukum.
3. Peraturan Daerah bersifat terikat dengan Undang-Undang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak punya Hak Veto terhadap Undang-Undang Negara yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Peraturan Daerah dicabut oleh Pemerintah Pusat.
6. Semi Sentralisasi
7. Bisa interversi dari kebijakan pusat.
8. Perjanjian dengan pihak asing atau luar negeri harus melalui pusat.
9. APBN dan APBD tergabung.
10. Pengeluaran APBN Dan APBD dihitung perbandingannya.
11. Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat.
12. Daerah harus mandiri.
13. Keputusan PEMDA diatur oleh Pemerintah Pusat.
14. Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan.
15. Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama.

16. Tiga kekuasaan daerah tidak diakui.
17. Hanya hari libur nasional yang diakui.
18. Bendera Nasional yang hanya diakui.
19. Bahasa Nasional sebagai bahasa yang diakui.

2. Pajak

Definisi pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013:4) menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam definisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi *budgetair* dari pada pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yaitu salah satunya ialah fungsi mengatur. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak itu sendiri adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat membiayai tujuan selain *budgetair* yaitu mengatur.

Menurut S.Meilala (2016:16) menyatakan bahwa sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu antara lain:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu pajak dimasukkan kedalam APBD sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras demikian pula dengan pajak barang mewah.

Pajak dapat dikelompokkan kedalam berbagai kelompok diantaranya yaitu berdasarkan golongan dimana pajak terbagi atas dua yakni pajak langsung (pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung (pajak pertambahan nilai). Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua yakni pajak subjektif (pajak penghasilan) dan pajak objektif (pajak pertambahan atas barang mewah). Berdasarkan cara pemungut dan pengelolanya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat diantaranya (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pbb, dan bea materai) dan pajak daerah diantaranya (pajak parkir, pajak reklame,dan pajak hiburan).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi terdapat jenis-jenis pajak daerah yaitu :

- a. Jenis pajak provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
- b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet.

Menurut Ahmad (2013) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia” menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Adapun asas-asas pemungutan pajak itu sendiri adalah: *Equality* dimana pemungutannya harus bersifat adil dan merata, *Certainty* dimana penetapan atas pajak itu sendiri tidak dapat dipatokkan melainkan sewenang-wenang, *Convenience* dimana sistem pemungutannya disebut *pay as you earn* yang artinya dimana pajak yang terutang dibayarkan ketika wajib pajak itu mempunyai penghasilan, *Economy* dimana biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak diusahakan seminim mungkin. Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan, dalam pengungkapan asas pemungutan pajak, ada beberapa teori yang mendasarinya yaitu diantaranya teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori daya pikul, teori bakti, teori asas daya beli.

Menurut S.Meilala (2016:8) ada beberapa teori yang mendasari pemungutan pajak yakni:

- a. Teori Asuransi

Teori ini mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang (warga negara), karena warga negara tersebut telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah yaitu keselamatan jiwa dan dendanya. Dengan perkataan lain karena negara melindungi rakyat, maka rakyat harus membayar premi kepada negara dalam bentuk pajak (hampir sama dengan perusahaan asuransi). Sekarang teori ini sudah tidak dipakai lagi karena tidak tepat lagi dan bertentangan dengan sifat pajak yang diartikan bahwa untuk pembayaran pajak tersebut rakyat tidak meminta imbalannya secara langsung, sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, yang harus membayar pajak adalah orang yang berkepentingan, dan besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Teori ini sudah tidak dipakai lagi dikarenakan tidak sesuai dengan sifat pajak, dimana kadang-kadang yang berkepentingan adalah orang yang tidak mampu yang justru dilindungi oleh negara, misalnya rakyat miskin yang memerlukan perlindungan dalam jaminan sosial, sehingga disini terdapat kepentingan yang saling bertentangan. Dimana disatu pihak, negara mempunyai kepentingan untuk menghimpun dana dari pajak, tetapi dilain pihak orang yang mempunyai kepentingan ini tidak mampu membayarnya. Sedangkan menurut teori seharusnya mereka yang lebih banyak membayar pajak, oleh karena itu tidak sesuai dengan kenyataan.

c. Teori Daya Pikul

Menurut teori daya pikul semua warga negara harus membayar pajak, dimana besar kecilnya pajak tersebut harus sesuai dengan gaya (daya) pikul seseorang. Yang termasuk dalam gaya pikul ini adalah segala macam beban pengeluaran dan tanggungan keluarganya, dan ini baru dapat dipikul bila seseorang mempunyai penghasilan. Gaya pikul seseorang tergantung dari pendapatan yang diperolehnya, susunan keluarga dan dari jumlah kekayaan yang dimilikinya. Teori ini disebut juga teori modern pemungutan pajak dan hampir dipakai disemua negara.

d. Teori Daya Beli

Teori ini mengatakan bahwa setiap warga negara harus membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar berarti pendapatannya cukup besar pula, kemudian daya beli tersebut oleh negara dalam bentuk pajak, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Jadi pajak ini berasal dari rakyat sesuai dengan kemampuannya yang kemudian kembali kepada rakyat yang disalurkan negara melalui pembangunan dan sebagainya.

e. Teori Bakti

Teori ini mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat kepada pemerintahannya, sehingga negara mempunyai hak atas warganya dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.

3. Pajak Parkir

Menurut Ahmad (2013:56) Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir menyebutkan Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun yang menjadi dasar pengenaan pajak parkir yaitu :

- a. Jumlah pembayaran atau uang yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- b. Dalam hal parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, area parkir, waktu dan jumlah kendaraan.
- c. Pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap, progresif, vallet dan parkir area khusus.
- d. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, adapun yang menjadi tarif pajak parkir adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.
- b. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran.
- c. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir vallet dikenakan pajak sebesar 30% (tiga puluh persen).

4. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang digunakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian atas jasa tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Ahmad (2013:63) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang

dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Yang menjadi objek dari retribusi daerah itu sendiri adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Dan yang menjadi subjek retribusi daerah itu sendiri adalah orang pribadi ataupun badan usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 26 menyebutkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan yang artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (surat tagihan retribusi daerah). Retribusi daerah dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- a. Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum diantaranya yaitu, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat

pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan.

- b. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun jenis retribusi jasa usaha itu sendiri yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan diatas air, retribusi pengelolaan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- c. Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengendalian. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman berakohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

5. Retribusi Parkir

Menurut Ahmad (2013:68) Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik daerah dan swasta. Objek retribusi parkir itu sendiri adalah

peelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa tempat parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi parkir itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa berupa tempat parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir. Dan retribusi parkir termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha, dimana dalam retribusi jasa usaha menganut prinsip komersial, yaitu dimana pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan juga pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai yang disediakan oleh pihak swasta.

Berikut merupakan daftar tarif retribusi parkir yang tertuang Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 yaitu:

Tabel 2.1 Tarif Parkir Ditepi Jalan Umum

Jenis Kendaraan	Lokasi Parkir (Kelas I)	Lokasi Parkir (Kelas II)
Truk dengan gandengan, trailer	Rp. 10.000	Rp. 5.000
Truk, bus, alat besar/berat	Rp. 6.000	Rp. 4.000
Truk mini dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 5.000	Rp. 3.000
Pick up, mobil penumpang, dan kendaraan lain yg sejenis.	Rp. 3.000	Rp. 2.000
Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga).	Rp. 2.000	Rp. 1.000

Sumber: Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014

Tabel 2.2 Tarif Parkir Ditempat Khusus

Jenis Kendaraan	Tarif Per Sekali Parkir
Bus, truk , alat besar / berat	Rp. 6.000

Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan kendaraan lain yang sejenis	Rp. 3.000
Sepeda motor	Rp. 2, 000

Sumber: Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014

6. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, penerimaan dari dinas serta penerimaan lain-lain, dan penerimaan atas pembangunan (pinjaman daerah).

Menurut Ahmad (2013:51) yang dimaksud dengan Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan yang berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah, semakin banyak kegiatan suatu daerah yang dibiayai dari PAD berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah. Adapun yang menjadi sumber Pendapatan asli daerah itu sendiri antara lain yaitu:

- a. Hasil pajak daerah dimana pajak daerah yang bersumber dari berbagai macam jenis pajak, salah satu contohnya yaitu pajak parkir.
- b. Hasil retribusi daerah dimana retribusi daerah yang bersumber dari berbagai macam jenis retribusi daerah, salah satu contohnya yaitu retribusi parkir.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, Swasta dan kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah dimana yang termasuk lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar-daerah, dan kegiatan impor atau ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor antara lain retribusi izin masuk kota dan pajak atau retribusi atas pengeluaran dan pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lainnya.

7. Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143) menyebutkan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan atau sasaran akhir suatu kebijakan, semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Sudarso (2017:13) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%. Dengan demikian, semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintahanpun semakin baik. Pajak parkir, retribusi parkir, dan pendapatan asli daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian diatas diatas 100% dapat diartikan sangat efektif.
- b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% dapat diartikan efektif.
- c. Tingkat pencapaian diantara 80% - 90% dapat diartikan cukup efektif.
- d. Tingkat pencapaian diantara 60% - 80% dapat diartikan kurang efektif.
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60% dapat diartikan tidak efektif.

8. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan asli daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir

dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Berikut refrensi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama atau Tahun	Judul	Variabel	Model Analisa	Hasil Penelitian
1	Destika Religia (2014)	Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011 sampai 2013	X1= Pajak Parkir. X2=Retribusi Parkir. Y=Pendapatan Asli Daerah	Analisa Regresi Linier Berganda	1) Secara keseluruhan penerimaan pajak parkir kota bandung melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan penerimaan retribusi parkir tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 2) Rasio efektivitas pajak parkir kota bandung memiliki rata-rata nilai efektivitas sangat efektif, dan Rasio efektivitas Pendapatan asli daerah kota bandung memiliki rata-rata nilai efektivitas sangat efektif. 3) Tidak terdapat pengaruh secara parsial maupun simultan efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir terhadap efektivitas PAD kota Bandung.

2	Debi Aprilliwati (2014)	Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.	X1= Pajak Parkir. Y = Pendapatan Asli Daerah	Analisa Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Mojokerto Tahun 2009-2013 dimana pada tahun 2009 pajak parkir Kota Mojokerto telah mencapai target dengan persentase melebihi 100% , pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan dengan kata lain tidak mencapai target. Namun pada tahun 2012 realisasi pajak parkir mengalami kenaikan , dan pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan tersebut salah satunya yaitu jumlah penitipan kendaraan bermotor tidak maksimal.
3	Molan M.Mosal (2013)	Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado.	X1= Kontribusi Pajak Parkir Y= Pendapatan Asli Daerah	Analisa Regresi Linier Berganda	Hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 dapat disimpulkan kontribusinya sangat kurang. Rata-rata persentase lima tahun terakhir adalah 105,71% dan sesuai dengan kriteria yang digunakan maka pesentase ini tidak termasuk dalam kriteria sangat efektif.

4	Ghanang Ahmad Fathani (2016)	Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2011 sampai 2016.	X1= Pajak Parkir X2= Retribusi Parkir Y= Pendapatan Asli Daerah	Analisa Regresi Linier Berganda	Efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Surakarta 5 tahun terakhir (2011-2015) dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya lebih dari 100%. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Surakarta dikatakan efektif, karena persentase efektivitasnya 100,43% . Dan untuk rata-rata kontribusi pajak parkir di Kota Surakarta sebesar 1,52% yang artinya kontribusi pajak parkir lebih kecil daripada seluruh pajak daerah 13,22%. Untuk rata-rata kontribusi retribusi parkir sebesar 5,51% dimana artinya kontribusi pajak parkir lebih besar dari pada retribusi daerah lainnya yaitu sebesar 2,75%. Dan adapun laju pertumbuhan penerimaan pajak parkirnya menunjukkan pertumbuhan yg positif. Begitu juga halnya dengan laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir. Maka dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi pajak parkir di Kota Surakarta termasuk dalam kategori berkembang, yang artinya kontribusi yang dihasilkan masih sedikit, namun pada potensi retribusi parkir di Kota Surakarta dapat dikatakan potensi prima dan bisa menjadi sektor andalan bagi pemerintah Kota
---	------------------------------	---	---	---------------------------------	---

					Surakarta.
5	P.Heru Prasetyo (2008)	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.	X1= Retribusi Parkir Y= Pendapatan Asli Daerah	Analisa Regresi Linier Berganda	<p>1.Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2004-2005 adalah positif,</p> <p>2.Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2003,2004,2006, tidak efektif, namun pada tahun 2005 dapat dikatakan efektif karena efektivitasnya berada diatas 100%. Dan efesiensi penerimaan retribusi parkir berjalan cukup efisien, dikarenakan efesiensi yang dicapai berada dibawah 100%.</p> <p>3.Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Yogyakarta pada tahun 2003-2005 cenderung meningkat , namun terjadi penurunan pada tahun 2004-2006.</p>

Sumber : Penulis(2018)

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui dalam suatu

masalah tertentu. Kerangka konseptual menghubungkan secara teoritis antara variabel penelitian yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dimana apabila pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan penerimaannya terhadap maka suatu daerah tidak lagi memerlukan banyak bantuan dana dari pemerintah pusat demi terwujudnya otonomi daerah. Pada saat ini Pajak Parkir Kota Medan belum bisa dikatakan mampu untuk memberikan sumbangsih terhadap PAD Kota Medan. Hal ini terjadi demikian serupa dengan Retribusi Parkir Kota Medan, belum bisa dikatakan mampu untuk memberikan sumbangsih terhadap PAD Kota Medan secara maksimal, hal ini diperkuat dengan adanya data yang didapat oleh penulis pada Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2018. Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir dapat terlihat apabila target yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat dapat terpenuhi melalui pencapaian realisasinya, begitu juga halnya dengan Efektivitas PAD. Berikut keterangan hubungan antara variabel bebas satu dengan yang lainnya terhadap variabel terikat :

1. Pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah

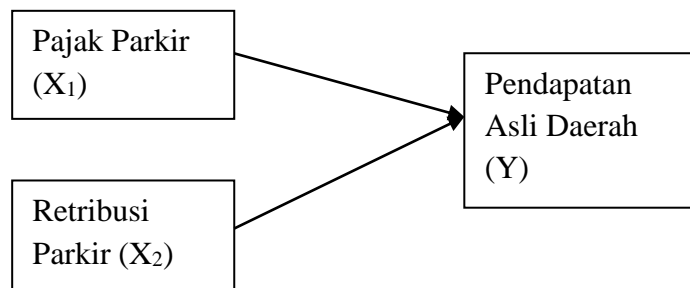
Menurut Faizatullailah (2013) menyatakan bahwa pajak parkir mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah. Dan pajak parkir berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, meskipun mempunyai pengaruh yang relative kecil terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Nariana (2012) menyatakan bahwa ada hubungan secara signifikan Antara kontribusi pajak parkir dengan

pendapatan asli daerah (PAD), dimana hal ini menunjukkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang.

2. Retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah

Menurut Faizatullailah (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah baik secara parsial maupun secara simultan. Menurut Faizatullailah (2013) menyatakan bahwa retribusi parkir mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah. Dan retribusi parkir berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah .

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dari pengertian tersebut penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak parkir pada tahun 2014-2016 kurang efektif.
2. Tingkat efektivitas retribusi parkir pada tahun 2014-2016 cukup efektif.

3. Pajak parkir Pada tahun 2014 berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,09%, pada tahun 2015 berkontribusi sebesar 8,32%, pada tahun 2016 berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,98%. Dan untuk retribusi parkir sendiri memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,73% pada tahun 2014, 10,34% pada tahun 2015, dan 13,59% pada tahun 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini. Baik tentang fenomena bervariasi tunggal maupun korelasi atau perbandingan beberapa variabel (Sugiyono,2013).

Tujuan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak parkir, retribusi parkir, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Medan.

B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada bagian yang ada pemerintah Kota Medan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan November 2017 sampai dengan selesai, dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

		Tahun 2017-2019																	
No	Jenis kegiatan	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	1	2	3	
1	Pengajuan judul	■																	
2	Pengesahan Judul		■																
3	Penyusunan Proposal			■	■														
4	Perbaikan /Acc Proposal					■	■	■	■										
5	Pengelolaan Data									■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Penyusunan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Ujian Meja Hijau																	■	

C. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi pajak parkir, retribusi parkir, dan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Medan.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013:810) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus data yaitu semua populasi dijadikan sebagai sampel yaitu sebanyak 3 tahun periode 2014-2016.

Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan bersifat kuantitatif serta data yang dimaksud menggunakan data bulanan sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini berjumlah 36 bulan.

Data diperoleh dari Laporan Realisasi pajak parkir, retribusi parkir, dan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Medan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Data yang dibutuhkan adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu, total realisasi pajak parkir, total realisasi retribusi parkir, dan total realisasi pendapatan asli daerah.

D. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu (X) Pajak Parkir (X_1) Retribusi Parkir (X_2), serta satu variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Pajak parkir	<p>Efektivitas pajak parkir $= \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$ (Morin M.Mosal,2013)</p>	<p>Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. (Yani,Ahmad,2013:56)</p>	Rasio

Retribusi parkir	<p>Efektivitas retribusi parkir $= \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$ <i>(Ghanang AhmadFathoni,2016)</i></p>	<p>Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta. <i>(Yani,Ahmad,2013:68)</i></p>	Rasio
PAD	<p>Efektivitas PAD $= \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$ <i>(Dr.Yoyo Sudaryo,dkk:2017)</i></p>	<p>PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Rasio

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku dan arsip-arsip pemerintah daerah yang dimana dalam penelitian ini yaitu pemerintah Kota Medan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Medan yang telah dirangkum menjadi sebuah data yang berkaitan dengan variabel pada penelitian ini.

2. Wawancara

Dimana dalam hal ini dilakukannya komunikasi yang bertujuan untuk mendapat data yang diperlukan ataupun yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan didalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data primer yang dilakukan untuk menguji dan menilai setiap data menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis serta mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Medan dari data kuantitatif serta untuk mengetahui efektivitas penetimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

1. Rumusan masalah pertama

Untuk menghitung tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Medan pada tahun 2014 sampai dengan 2016 digunakan analisis efektivitas yang diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan pajak parkir}} \times 100\%$$

Dalam menggunakan rumus ini, maka peneliti memerlukan data target dan relaisasi daripada penerimaan pajak parkir dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan memasukkan hasil perhitungannya kedalam tabel sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Medan Tahun 2014-2016				
No	Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi Rupiah	Presentase
1	2014			
2	2015			
3	2016			

Kemampuan memperoleh penerimaan pajak parkir dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai 1 atau 100%.

2. Rumusan masalah kedua

Untuk menghitung tingkat efektivitas retribusi parkir di Kota Medan pada tahun 2014 sampai dengan 2016 digunakan analisis efektivitas yang diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas retribusi parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{Target penerimaan retribusi parkir}} \times 100\%$$

Dalam menggunakan rumus ini, maka peneliti memerlukan data target dan realisasi daripada penerimaan retribusi parkir dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan memasukkan hasil perhitungannya kedalam tabel sebagai berikut :

Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Medan Tahun 2014-2016				
No	Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi Rupiah	Presentase
1	2014			
2	2015			
3	2016			

Kemampuan memperoleh penerimaan retribusi parkir dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai 1 atau 100%.

3. Rumusan masalah ketiga

Untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah ketiga, maka dilakukan dengan menggunakan analisis kontribusi yang bertujuan untuk mengetahui

seberapa besar pajak parkir dan retribusi parkir dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam menggunakan rumus ini, maka peneliti memerlukan data target dan realisasi daripada penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan memasukkan hasil perhitungannya kedalam tabel sebagai berikut :

Kontribusi penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2014-2016				
No	Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi
1	2014			
2	2015			
3	2016			

- b. Kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam menggunakan rumus ini, maka peneliti memerlukan data target dan realisasi daripada penerimaan retribusi parkir dan pendapatan asli daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan memasukkan hasil perhitungannya kedalam tabel sebagai berikut

Kontribusi penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Tahun 2014-2016				
No	Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi
1	2014			
2	2015			
3	2016			

Jika penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir meningkat setiap tahunnya hal itu dapat diartikan mampu untuk berkontribusi kepada pendapatan asli daerah dan apabila penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir mengalami penurunan disetiap tahunnya maka kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah juga semakin buruk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Kota Medan

Berdasarkan kutipan yang diambil dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan) Medan berasal dari kata bahasa Tamil *Maidhan* atau *Maidhanam* yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas yang kemudian teradopsi ke Bahasa Melayu. Hari jadi Kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 yang pada mulanya ditetapkan pada tanggal 1 April 1909. Tanggal ini kemudian mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa ahli sejarah. Karena itu wali kota membentuk panitia sejarah hari jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat Keputusan Wali kotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Drs. Sjoerkani membentuk Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Medan. Duduk sebagai Ketua adalah Prof. Mahadi, SH, Sekretaris Syahrudin Siwan, MA, Anggotanya antara lain Ny. Mariam Darus, SH dan T.Luckman, SH.

Untuk lebih mengintensifkan kegiatan kepanitiaan ini dikeluarkan lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No.618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan dengan Ketuaanya Prof.Mahadi, SH, Sekretaris Syahrudin Siwan, MA dan Anggotanya H. Mohammad Said, Dada Meuraxa, Letkol. Nas Sebayang, Nasir Tim Sutannaga, M.Solly Lubis, SH, Drs.Payung Bangun, MA dan R. Muslim Akbar. DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga

merekapun membentuk Pansus dengan ketua M.A. Harahap, beranggotakan antara lain Drs. M.Hasan Ginting, Ny. Djanius Djamin SH., Badar Kamil, BA dan Mas Sutarjo. Dalam buku *The History of Medan* tulisan Tengku Luckman Sinar (1991) dituliskan bahwa menurut "Hikayat Aceh", Medan sebagai pelabuhan telah ada pada tahun 1590, dan sempat dihancurkan selama serangan Sultan Aceh Alauddin Saidi Mukammil kepada Raja Haru yang berkuasa di situ. Serangan serupa dilakukan Sultan Iskandar Muda tahun 1613, terhadap Kesultanan Deli. Sejak akhir abad ke-16, nama Haru berubah menjadi Ghuri, dan akhirnya pada awal abad ke-17 menjadi Deli.

Pertempuran terus-menerus antara Haru dengan Aceh mengakibatkan penduduk Haru jauh berkurang. Sebagai daerah taklukan, banyak warganya yang dipindahkan ke Aceh untuk dijadikan pekerja kasar. Selain dengan Aceh, Kerajaan Haru yang makmur ini juga tercatat sering terlibat pertempuran dengan Kerajaan Melayu di Semenanjung Malaka dan juga dengan kerajaan dari Jawa. Serangan dari Pulau Jawa ini antara lain tercatat dalam kitab Pararaton yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu. Dalam negara kertagama Mpu Prapanca juga menuliskan bahwa selain pane (panai), Majapahit juga menaklukkan *Kampe* (Kampai) dan *Harw* (Haru). Berkurangnya penduduk daerah pantai timur Sumatra akibat berbagai perang ini, lalu diikuti dengan mulai mengalirnya suku-suku dari dataran tinggi pedalaman turun ke pesisir pantai timur Sumatra. Suku Karo bermigrasi ke daerah pantai Langkat, Serdang, dan Deli. Suku Simalungun ke daerah pantai Batubara dan Asahan, serta suku Mandailing ke daerah pantai Kualuh, Kota Pinang, Panai, dan Bilah.

Dalam *Riwayat Hamparan Perak* yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo pada rangkaian bilah bambu, tercatat Guru Patimpus, tokoh masyarakat Karo, sebagai orang yang pertama kali membuka "desa" yang diberi nama Medan. Namun naskah asli *Riwayat Hamparan Perak* yang tersimpan di rumah Datuk Hamparan Perak terakhir telah hangus terbakar ketika terjadi "kerusuhan sosial", tepatnya tanggal 4 Maret 1946. Patimpus adalah anak Tuan Si Raja Hita, pemimpin Karo yang tinggal di Kampung Pekan (Pakan). Ia menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik, sehingga akhirnya dikenal sebagai Guru Patimpus. Antara tahun 1614-1630 Masehi, ia belajar agama Islam dan diislamkan oleh Datuk Kota Bangun, setelah kalah dalam adu kesaktian. Selanjutnya Guru Patimpus menikah dengan adik Tarigan, pemimpin daerah yang sekarang bernama Pulau Brayon dan membuka Desa Medan yang terletak di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Dia pun lalu memimpin desa tersebut.

Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590 kemudian dipandang sebagai pembuka sebuah kampung yang bernama Medan Puteri walaupun sangat minim data tentang Guru Patimpus sebagai pendiri Kota Medan. Karenanya hari jadi ditetapkan berdasarkan perkiraan tanggal 1 Juli 1590 dan diusulkan kepada Wali kota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan, yang kemudian dibawa ke Sidang DPRD Tk.II Medan untuk disahkan. Berdasarkan Sidang DPRD tanggal 10 Januari 1973 ditetapkan bahwa usul tersebut dapat disempurnakan. Sesuai dengan sidang DPRD, Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan Surat Keputusan No.74 tanggal 14 Februari 1973 agar Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan melanjutkan

kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan yang dilakukan oleh Pansus Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A.Harahap bulan Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590. Secara resmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai Hari Jadi Kota Medan dan mencabut Hari Ulang Tahun Kota Medan yang diperingati tanggal 1 April setiap tahunnya pada waktu sebelumnya.

Di Kota Medan juga menjadi pusat Kesultanan Melayu Deli, yang sebelumnya adalah Kerajaan Aru. Kesultanan Deli adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Deli (kini Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Indonesia). John Anderson, orang Eropa asal Inggris yang mengunjungi Deli pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Raja Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim disana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai.

Pada tahun 1886 Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota dan tahun berikutnya menjadi ibukota Karesidenan Sumatra Timur sekaligus ibukota Kesultanan Deli. Tahun 1909 Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra Melayu, dan seorang Tionghoa. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti

mendatangkan orang Tionghoa karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan.

Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru dan ulama. Sejak tahun 1950 Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha pada tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir delapan belas kali lipat.

2. Letak Geografis Kota Medan

Berdasarkan kutipan yang diambil dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Medan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan) Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatra Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.

3. Batas Wilayah Kota Medan

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan.

Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah pinggir jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

4. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.

Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) Kota Medan dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah Kota Medan. Peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Medan melalui Peraturan Daerah Kota Medan No.2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, maka bagian Keuangan Seretariat Daerah Kota Medan yang terdiri dari 5 bagian tersebut ditingkatkan menjadi BPKD yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah Kota Medan. Pada awal tahun 2017 terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah pada Badan Pengelola Daerah

(BPKD) yang kini telah berganti nama menjadi Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) yang terdiri 5 bidang yaitu, sekretariat, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, serta aset dan investasi. Perubahan tata kerja perangkat daerah diatas terbentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Medan dan pada Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 yang berisi tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.

Sejak perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, pengelolaan keuangan pemerintah bergeser ke masing-masing Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan sebuah aplikasi sistem informasi manajemen yang dikenal dengan nama sistem informasi manajemen kauangan daerah (SIMDA) adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA ini dikembangkan dengan memprihatikan dan mengimplementasikan sistem pengendalian informasi pemerintah(SPIP). Simda juga merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan akurat untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat dan mefasilitasi pstisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Dengan aplikasi SIMDA ini, pemerintah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penaausahaan hingga akutansi dan pelaporannya.

5. Visi dan Misi serta Fungsi dan Tugas BPKAD Kota Medan

BPKAD Kota Medan berkeinginan agar setiap aparatur pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna yang didukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP).

a. Visi BPKAD Kota Medan

Adapun yang menjadi visi dari BPKAD Kota Medan antara lain :

- 1). Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.
- 2). Sumber daya aparatur pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan.
- 3). Sumber daya aparatur pemerintah Kota Medan yang berpengabdian.
- 4). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
- 5). Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

b. Misi BPKAD Kota Medan

Adapun yang menjadi misi BPKAD Kota Medan diantaranya yaitu:

- 1). Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan.
- 2). Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik.
- 3). Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah Kota Medan.

Ketiga misi BPKAD Kota Medan diatas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut:

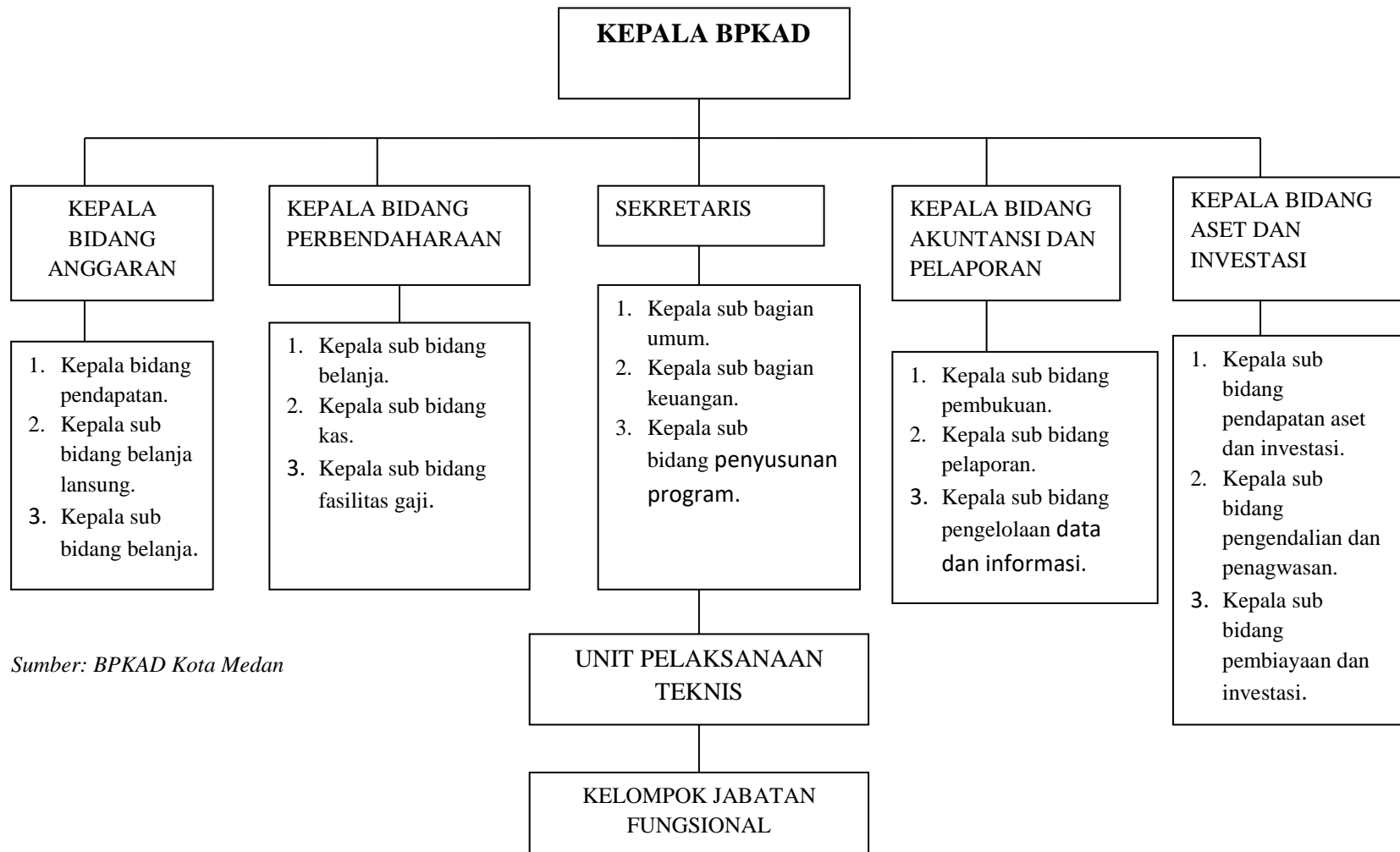
- a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan aparatur pemerintah Kota Medan. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan bagi aparatur, sebagai aparatur pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program rencana kerja yang telah disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Meningkatkan transparansi, efesiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan, pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Medan harus memiliki manfaat tepat guna berbasis kinerja sehingga dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, efisien, dan efektif.
- c. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik. Salah satu tujuan organisasi pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau, dan adil maka disadari bahwa pada praktiknya tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber

daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya.

- d. Meningkatkan efisiensi, dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah Kota Medan. Tercapainya tujuan organisasi ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan, disamping adanya peran penting faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karier dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, serta budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.

6. Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan

Pada BPKAD Kota Medan terdapat 5 (lima) bagian yang akan dijelaskan, hal tersebut akan diperlihatkan pada gambar dibawah ini:



Sumber: BPKAD Kota Medan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan

7. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir

Adapun untuk mencari nilai efektivitas dari pada pajak parkir itu sendiri yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan pajak parkir}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, maka dapat dilihat hasilnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Target dan realisasi pajak parkir

Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Medan Tahun 2014-2016				
No	Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi Rupiah	Presentase
1	2014	Rp 10.000.000.000	Rp 8.306.835.014	83,06%
2	2015	Rp 11.000.000.000	Rp12.402.467.116	112,74%
3	2016	Rp 14.000.000.000	Rp 16.866.401.417	120,47%

Sumber: Bpkad Kota Medan (2018)

Tabel 4.2 Kriteria efektivitas pajak parkir

Efektivitas Pajak Parkir Kota Medan Tahun 2014-2016			
No	Tahun Anggaran	Presentase	Kriteria Efektivitas
1	2014	83,06%	Cukup Efektif
2	2015	112,74%	Sangat Efektif
3	2016	120,47%	Sangat Efektif

Sumber : Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak parkir pada tahun 2014 memiliki nilai sebesar 83,06% dimana artinya point tersebut tergolong dalam kategori cukup efektif, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 112,74% yang artinya point tersebut tergolong dalam kategori sangat efektif, dan pada tahun 2015 terus mengalami kenaikan menjadi 120,47%. Pada kurun waktu tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan daripada pajak parkir termasuk cukup efektif.

8. Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Parkir

Adapun untuk mencari nilai efektivitas dari pada retribusi parkir itu sendiri yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas retribusi parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{Target penerimaan retribusi parkir}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, maka dapat dilihat hasilnya pada tabel dibawah ini

Tabel 4.3 Target dan realisasi retribusi parkir

Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Medan Tahun 2014-2016				
No	Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi Rupiah	Presentase
1	2014	Rp 17.557.000.000	Rp 13.472.001.000	76,74%
2	2015	Rp 27.968.600.000	Rp 19.882.116.000	71,87%
3	2016	Rp 27.968.600.000	Rp 20.872.291.000	74,62%

Sumber : Bpkad Kota Medan (2018)

Tabel 4.4 Kriteria efektivitas retribusi parkir

Efektivitas Retribusi Parkir Kota Medan Tahun 2014-2016			
No	Tahun Anggaran	Presentase	Kriteria Efektivitas
1	2014	76,74%	Kurang Efektif
2	2015	71,87%	Kurang Efektif
3	2016	74,62%	Kurang Efektif

Sumber : Diolah penulis (2018)

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa efektivitas retribusi parkir belum bisa dikatakan efektif. Pada tahun 2014 presentase untuk efektivitas retribusi parkir hanya sebesar 76,74%, pada tahun 2015 sebesar 71,87%, dan pada tahun 2016 sebesar 74,62%.

9. Hasil Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Adapun untuk mencari nilai efektivitas pendapatan asli daerah itu sendiri yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus diatas, maka dapat dilihat hasilnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Target dan realisasi PAD

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2014-2016				
No	Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi Rupiah	Presentase
1	2014	Rp 1.678.116.623.125	Rp1.384.246.114.729	82,48%
2	2015	Rp 1.794.704.774.012	Rp1.489.723.189.088	83,00%
3	2016	Rp 1.884.851.580.563	Rp1.535.259.539.056	81,45%

Sumber : Bpkad Kota Medan (2018)

Tabel 4.6 Kriteria efektivitas PAD

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2014-2016			
No	Tahun Anggaran	Presentase	Kriteria Efektivitas
1	2014	82,48%	Cukup Efektif
2	2015	83,00%	Cukup Efektif
3	2016	81,45%	Cukup Efektif

Sumber : Diolah penulis (2018)

Pendapatan asli daerah Kota Medan belum mampu merealisasikan target yang telah ditentukan. Pada tahun 2014 presentasi realisasi memiliki nilai sebesar 82,48%, pada tahun 2015 sebesar 83,00%, dan pada tahun 2016 sebesar 81,45%.

10. Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

- a. Analisis ini digunakan untuk menghitung kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{8.306.835.014}{1.384.246.114.729} \times 100\% \\ &= 6,09\% \end{aligned}$$

2) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{12.402.467.116}{1.489.723.189.088} \times 100\% \\ &= 8,32\% \end{aligned}$$

3) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{16.866.401.417}{1.535.259.539.056} \times 100\% \\ &= 10,98\% \end{aligned}$$

Tabel 4.7 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD

Kontribusi penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2014-2016				
No	Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi
1	2014	Rp 8.306.835.014	Rp1.384.246.114.729	6,09%
2	2015	Rp 12.402.467.116	Rp1.489.723.189.088	8,32%
3	2016	Rp 16.866.401.417	Rp1.535.259.539.056	10,98%

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan kata lain setiap tahunnya mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 2%.

- b. Analisis ini digunakan untuk menghitung kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1) Kontribusi penerimaan pajak parkir tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{13.472.001.000}{1.384.246.114.729} \times 100\% \\ &= 9,73\% \end{aligned}$$

2) Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{19.882.116.000}{1.489.723.189.088} \times 100\% \\ &= 10,34\% \end{aligned}$$

3) Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{20.872.291.000}{1.535.259.539.056} \times 100\% \\ &= 13,59\% \end{aligned}$$

Tabel 4.8 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD

Kontribusi penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Tahun 2014-2016				
No	Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi
1	2014	Rp 13.472.001.000	Rp1.384.246.114.729	9,73%
2	2015	Rp 19.882.116.000	Rp1.489.723.189.088	10,34%
3	2016	Rp 20.872.291.000	Rp1.535.259.539.056	13,59%

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan kata lain setiap tahunnya mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 1 sampai dengan 3%.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak parkir maka dapat disimpulkan bahwa, sektor pajak parkir dapat dikatakan cukup mampu untuk berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan uraian pada tahun 2014 persentase efektivitas pajak parkir sebesar 83,06% , tahun 2015 persentase efektivitas pajak parkir sebesar 112,74% dan pada tahun 2016 memiliki nilai persentase pajak parkir sebesar 120,47%.

Sektor retribusi parkir sendiri dalam penerimaannya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sangat belum mampu atau dengan kata lain belum bisa dikatakan efektif. Pada tahun 2014 persentase retribusi pajak parkir hanya memberikan 76,74% kepada Pendapatan Asli Kota Medan, dan ditahun 2015 sebesar 71,87% serta pada tahun 2016 memiliki nilai efektivitas sebesar 74,62% , hal ini jauh yang diharapkan dari target yang telah diberikan pada sektor ini.

Pajak parkir berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar 6,09% , pada tahun 2015 naik pada angka 8,32%, dan pada tahun 2016 mencapai 10,98% hal ini berarti untuk sektor pajak parkir, memiliki peluang yang cukup besar untuk berkontribusi lebih terhadap PAD. Sedangkan retribusi parkir memiliki nilai kontribusi sebesar 9,73% pada tahun 2014 dan 10,34% ditahun 2015, dan pada tahun 2016 memiliki nilai sebesar 13,59%. Hal ini akan lebih baik lagi jika didukung oleh semua badan usaha ataupun orang pribadi melaporkan kegiatan penyelenggaraan tempat parkirnya kepada pemerintah setempat serta dilakukannya penyisiran terhadap juru parkir liar yang ada disetiap sudut kota.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas pajak parkir dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sudah cukup bisa dikatakan efektif terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Medan. Efektivitas pajak parkir pada tahun 2014 memiliki nilai sebesar 83,06% dimana artinya point tersebut tergolong dalam kategori cukup efektif, dan pada tahun 2015 menjadi 112,74% yang artinya point tersebut tergolong dalam kategori sangat efektif, dan pada tahun 2015 terus mengalami kenaikan menjadi 120,47%. Namun walaupun angka tersebut sudah bisa dikatakan sangat efektif, seharusnya pajak parkir lebih bisa memberikan angka lebih daripada tersebut, mengingat target yang diberikan tidak lah terlalu besar jika dibandingkan dengan sektor lain yang tergolong dalam sumber pendapatan asli daerah Kota Medan.
2. Tingkat efektivitas retribusi parkir dari tahun 2014 sampai dengan 2016 belum bisa dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2014 persentase untuk efektivitas retribusi parkir hanya sebesar 76,74%, pada tahun 2015 sebesar 71,87%, dan pada tahun 2016 sebesar 74,62%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha daripada penyediaan tempat parkir yang belum mendaftarkan unit usahanya atau melaporkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan, serta banyaknya parkir liar yang berserakan dimana-mana,

mengingat di Kota Medan sendiri untuk setiap toko maupun tempat makan sudah pasti ada juru parkir, namun mereka tidak menyetorkan hasilnya kepada yang berwenang. Tidak terealisasinya penerimaan retribusi parkir sangat disayangkan mengingat target yang diberikan tidaklah besar dengan potensi yang dimiliki daerah Kota Medan sangatlah besar.

3. Pajak Parkir berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2014 sebesar 6,09%, pada tahun 2015 sebesar 8,32%, pada tahun 2016 sebesar 10,98%. Retribusi parkir berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2014 sebesar 9,73%, pada tahun 2015 sebesar 10,34% dan pada tahun 2016 sebesar 13,59%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya adalah:

1. Diharapkan kepada dinas-dinas terkait yang memungut kontribusi daripada pajak parkir dan retribusi parkir agar lebih tegas terhadap pelaku badan usaha daripada pengaadaan tempat parkir, agar mereka melaporkan semua kegiatan usahanya sesuai dengan fakta yang ada, dan untuk parkir liar yang ada di Kota Medan, seharusnya dapat ditertibkan yang tujuannya agar dapat menaikkan pemasukan pendapatan asli daerah Kota Medan dari sektor parkir dengan setiap juru parkir liar didaftarkan dan diarahkan agar mereka melaporkan setiap pemasukannya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini bisa kepada Dinas Pendapatan dan Retribusi Daerah ataupun Dinas Perhubungan yang ada di Kota Medan.

2. Diharapkan pada penelitian-penelitian selanjutnya untuk menambah variabel-variabel independent yang lain, dimana variabel tersebut merupakan unsur penerimaan daripada pendapatan asli daerah itu sendiri. Dengan kata lain, dapat meneliti, aspek apa yang berpengaruh besar bagi penerimaan pendapatan asli daerah itu sendiri.
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat analisis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544
- Ahmad, Ghanang (2016). *Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2011 sampai 2016*.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Daulay, M. T., Elfındri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCET)*, 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCET)* , 1-10.
- Debi Aprilliwati (2014). *Analisis Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto*.
- Destika Religia (2014). *Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Sampai 2013*.
- Dinas Perhubungan Kota Medan (2015-2017). *Penerimaan Retribusi Parkir Kota Medan*. Medan.
- Direktorat Jenderal Pajak (2013) *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta, 2013.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Faizatullah Yustica (2013). *Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Volume 1 Nomor 3*, Agustus 2013.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heru Prasetyo (2008). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*.
- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.

- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* . UPP STIM YKPN.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mourin M.Mousal (2013).*Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado*.Jurnal EMBA Univerisitas Sam Ratulangi Manado Volume 1 Nomor4 ,Desember 2013. 374-382.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E–Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah Kota Medan.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- S.Meliala (2008).*Perpajakan Akuntansi Pajak*, -Edisi 6. Jakarta: Semesta Media.
- Sudarso.Yoyo,dkk (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : IKAPI.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997.*Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Itjen Hukum Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.*Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Kementrian Dalam Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000.*Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.Jakarta :Itjen Hukum Republik Indonesia.
- Yani.Ahmad (2013).*Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*-Edisi Revisi .Jakarta : Rajawali Pers.

www.pemkomedan.go.id

www.harian.analisadaily.com

www.rmolsumut.com

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan